

Judul : KPU Ajukan Hari Libur untuk PSU di 14 Daerah
Tanggal : Selasa, 11 Maret 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KPU Ajukan Hari Libur untuk PSU di 14 Daerah

Untuk daerah yang melaksanakan PSU di semua TPS di 14 daerah akan diajukan hari libur di daerah tersebut. Untuk daerah-daerah yang hanya akan menggelar PSU di beberapa TPS, KPU tidak akan mengajukan hari libur.

JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum akan mengajukan hari libur pada hari pemungutan suara di 14 daerah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang di semua tempat pemungutan suara. Angka partisipasi pemilihan di daerah-daerah tersebut diharapkan bisa optimal.

Ketua KPU Afifuddin, dalam rapat Komisi II DPR bersama para penyelenggara pemilu dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/3/2025), menegaskan bahwa KPU akan mengajukan hari libur di 14 daerah yang akan melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS. Ke-14 daerah itu merupakan bagian dari 24 daerah yang harus melaksanakan PSU.

Ke-14 daerah itu meliputi Provinsi Papua, Kota Banjarbaru, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kota Palopo, dan Kabupaten Parigi Moutong.

"Untuk PSU yang 100 persen TPS di 14 daerah akan kami ajukan untuk libur di daerah tersebut," katanya.

Namun, untuk daerah-daerah yang hanya menggelar PSU di beberapa TPS, KPU tidak akan mengajukan hari libur. "Yang PSU di empat TPS, dua TPS, biasanya tidak (libur). Karena biasanya *segmented* saja di beberapa TPS," katanya.

Sebelumnya, dalam rapat itu, anggota KPU, Idham Holic, menjelaskan, KPU telah melakukan simulasi waktu PSU untuk 24 daerah. Dari hasil simulasi ditetapkan hari pemungutan suara untuk 21 daerah akan digelar pada hari Sabtu. Sementara untuk tiga daerah lain digelar pada Rabu. Tiga daerah tersebut ialah Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Menurut Idham, PSU di tiga daerah tersebut digelar di hari yang berbeda karena memperhatikan faktor populasi pemilih di daerah tersebut. "Mengenai hari pemungutan suara atau *voting day* ini telah ditetapkan oleh KPU daerah dengan menggunakan (surat) keputusan," ujar Idham.

Berkaitan dengan simulasi hari pemungutan suara ini, KPU telah membuat beberapa kluster. Kluster pertama adalah untuk daerah-daerah dengan tenggat waktu pelaksanaan PSU paling lambat 30 hari, maka hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada Sabtu, 22 Maret 2025. Kluster

Kluster ketiga, untuk daerah-daerah dengan tenggat waktu pelaksanaan PSU paling lambat 60 hari, hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025. Kluster keempat, untuk daerah-daerah dengan tenggat waktu pelaksanaan PSU paling lambat 90 hari, hari pemungutan suara jatuh pada Sabtu, 24 Mei 2025.

Selanjutnya, khusus di tiga daerah, yakni Provinsi Papua, Kabupaten Boven Digoel, dan Kabupaten Kepulauan Talaud, KPU telah melakukan simulasi agar pemungutan suara dilakukan pada Rabu. Untuk Kabupaten Kepulauan Talaud yang masuk kluster PSU paling lambat 45 hari, hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 9 April 2025. Untuk Provinsi Papua yang masuk kluster PSU paling lambat 180 hari, hari pemungutan suara jatuh pada 6 Agustus 2025. Kemudian, untuk Kabupaten Boven Digoel yang masuk kluster PSU paling lambat 180 hari, hari pemungutan suara akan dilaksanakan pada 6 Agustus 2025.

Pelantikan lanjutan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, hingga Minggu (9/3), ada 15 daerah yang telah mengajukan usulan pengesahan pengangkatan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Daerah-daerah tersebut merupakan daerah-daerah yang hasil sengketa pilkadinya ditolak oleh MK atau gugatan tidak dapat diterima.

Tito mengatakan, pada prinsipnya, Presiden Prabowo Subianto ingin agar pelantikan bisa segera dilakukan sehingga para kepala daerah dapat langsung bekerja. "Jadi, tidak ada pelantikan serentak di Istana (Kepresidenan, Jakarta) seperti yang (20 Februari 2025) kemarin. Pelantikan serentak hanya sekali kemarin yang besar, 503 kepala daerah," katanya.

Tito juga mengungkapkan bahwa Presiden ingin pula agar kepala daerah hasil PSU nantinya bisa langsung dilantik sesuai diputuskan terpilih dan tidak ada sengketa di MK. Dengan begitu, tidak perlu menunggu hasil PSU dari daerah-daerah lain.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan bahwa nantinya akan ada gelombang kedua *retret* atau pembekalan kepala daerah. Menurut rencana, *retret* gelombang kedua ini dilaksanakan setelah Lebaran.

(BOW)